

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji kerjasama Indonesia–Malaysia di sektor jasa keuangan dalam kerangka *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) periode 2015–2023 dengan studi kasus CIMB Group sebagai holding di Malaysia dari CIMB Niaga di Indonesia dan Bank Mandiri sebagai perbankan perwakilan Indonesia di Malaysia. Hasil analisis menunjukkan bahwa AFAS, yang lahir sebagai instrumen liberalisasi jasa di ASEAN, secara umum telah berfungsi efektif dalam mendorong integrasi sektor keuangan kawasan. Hal ini tercermin dari semakin terbukanya akses pasar bagi bank-bank regional ASEAN serta peningkatan aliran jasa keuangan lintas batas. Kasus CIMB Group menjadi bukti konkret bagaimana bank asal Malaysia dapat memperluas jaringan bisnisnya di Indonesia melalui CIMB Niaga, sehingga integrasi finansial regional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terwujud dalam praktik operasional perbankan.

Namun demikian, temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan integrasi belum bersifat menyeluruh. Masih terdapat hambatan signifikan dalam implementasi AFAS, khususnya yang terkait dengan regulasi domestik. Salah satu contoh yang menonjol adalah kegagalan realisasi ekspansi Bank Mandiri di Malaysia, meskipun secara prinsip kerangka *Qualified ASEAN Bank* (QAB) sudah tersedia melalui *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF). Hambatan ini memperlihatkan bahwa perbedaan regulasi, standar prudensial, serta kehati-hatian nasional masih menjadi kendala utama dalam pencapaian integrasi yang lebih komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun liberalisasi telah dirancang di tingkat regional, pelaksanaannya tetap sangat dipengaruhi oleh kepentingan domestik dan kapasitas institusional tiap negara.

Dari perspektif teori liberalisme institusional, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa institusi regional seperti ASEAN memiliki peran penting dalam membangun kerjasama antarnegara. Melalui AFAS, ASEAN telah menjadi wadah yang mendorong keterbukaan, transparansi, dan kerangka aturan bersama yang memperkecil ketidakpastian dalam hubungan internasional. Namun, efektivitas institusi ini sangat bergantung pada

harmonisasi regulasi, kesediaan negara anggota untuk menyerasikan kepentingan nasional dengan agenda regional, serta konsistensi dalam implementasi kebijakan yang telah disepakati. Dengan kata lain, peran institusi tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya komitmen politik yang kuat dari negara-negara anggotanya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa AFAS telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat fondasi integrasi jasa keuangan ASEAN, khususnya dalam meningkatkan akses pasar dan mendorong ekspansi bank-bank regional. Akan tetapi, proses integrasi masih menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama pada aspek regulasi dan kesiapan domestik. Oleh karena itu, untuk mencapai integrasi perbankan ASEAN yang lebih menyeluruh, diperlukan upaya harmonisasi kebijakan yang lebih intensif, penguatan koordinasi antarotoritas keuangan, serta peningkatan komitmen politik di tingkat nasional. Kerjasama Indonesia–Malaysia dalam konteks AFAS pada akhirnya mencerminkan dinamika bahwa integrasi ekonomi regional tidak hanya merupakan peluang, tetapi juga menuntut upaya berkelanjutan dalam mengatasi perbedaan regulasi dan kepentingan nasional guna mewujudkan integrasi finansial yang lebih solid di kawasan Asia Tenggara.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

1. Penguatan Mekanisme Koordinasi OJK–BNM

Pemerintah Indonesia dan Malaysia disarankan untuk terus memperkuat kerangka bilateral antara OJK dan BNM melalui peningkatan frekuensi supervisi bersama, integrasi sistem informasi pengawasan lintas batas, dan peningkatan transparansi regulasi untuk mendukung pelaksanaan QAB secara konsisten dan efektif.

2. Standardisasi Implementasi QAB ASEAN-wide

ASEAN perlu mengembangkan template teknis QAB yang dapat dijadikan referensi oleh seluruh negara anggota. Hal ini akan membantu mempercepat proses negosiasi dan mengurangi asimetri prosedural yang selama ini menjadi kendala implementasi bilateral.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital dan AFIN

OJK bersama negara ASEAN lainnya didorong untuk mendorong keterlibatan QAB dalam inisiatif seperti ASEAN Financial Innovation Network (AFIN) untuk menciptakan inovasi lintas batas yang memperkuat efisiensi dan inklusi keuangan regional.

6.2.2 Saran Akademis

1. Perluasan Studi Kasus Negara ASEAN Lainnya

Penelitian akademik selanjutnya dapat memperluas studi ke negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Filipina, atau Vietnam untuk membandingkan efektivitas model QAB dan strategi pengawasan di berbagai konfigurasi bilateral.

2. Analisis Ekonomi Dampak QAB

Perlu dilakukan studi kuantitatif yang mengukur dampak kehadiran QAB terhadap indikator ekonomi seperti pertumbuhan kredit, profitabilitas perbankan, atau stabilitas makroprudensial di negara penerima.

3. Kajian Lintas Disiplin tentang Regulasi ASEAN

Pendekatan hubungan internasional perlu dikombinasikan dengan kajian hukum dan ekonomi kelembagaan untuk menganalisis dinamika integrasi sektor jasa di ASEAN. Fokus pada konsep nested sovereignty, soft regionalism, dan transgovernmentalism dapat memperkaya pemahaman atas integrasi berbasis konsensus yang dijalankan ASEAN.